



BPK Didesak Periksa Kembali Hibah di KONI dan PMI

Amurang, KOMENTAR

Hibah ke KONI dan PMI Minsel yang dianggarkan lewat APBD terus dipolemikan. Terutama pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Karenanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan dapat memeriksa lebih serius penggunaan dana hibah di kedua lembaga non pemerintahan tersebut

"Pertanggungjawaban hibah harus ada dan jelas serta sesuai standar keuangan pemerintah. Sebab dana yang diberikan milik pemerintah bukannya diserahkan bagi pribadi, tapi demi kemajuan dan terlaknanya tugas-tugas organisasi. Tidak bisa dikelola suka-suka dari pimpinan organisasi," tutur Ruddy Wurangian selaku tokoh masyarakat.

Dia menuturkan penyelidikan dapat dimulai dari keluhan atlet dan organisasi cabang olahraga (Cabor) di bawah KONI. Dari pengakuan yang kami dapat di media, janji-janji uang pembinaan tidak direalisasikan. Begitupun dengan bonus bagi atlet berprestasi. Sehingga menjadi pertanyaan besar menyangkut penggunaan dana hibah.

"Kan ramai di media yang

memberitakan KONI 'gagal' menyantuni organisasi Cabor. Begitu pula dengan janji bonus bagi atlet berprestasi. Nah dari sini saja BPK dapat menjadi awal penelusuran. Bukan hanya bagi BPK, penegak hukum juga kita rasa dapat masuk. Kan sudah sejak 2017 dan hingga kini masih berlanjut," terangnya.

Informasi yang diperoleh KONI menjanjikan pemberian bonus bagi atlet berprestasi di ajang Porprov 2019. Medali emas diberikan Rp 10 juta, Rp 7 juta peraih perak dan Rp 5 juta yang mendapatkan perunggu. Data raihan medali Minsel mengkoleksi 13 emas. Untuk perak dan perunggu, masing-masing mendapatkan 18 dan 23. Sehingga kalau KONI merealisasikan janjinya harus mengambil dana dari hibah sebesar Rp 371.000.000.

Pemberian bonus diinformasikan menggunakan anggaran hibah 2020. Bila dikalkulasikan masih tersisa Rp 629.000.000. Lalu akan dikemakan anggaran yang tidak terpakai di bonus atlet. Selanjutnya bagaimana dengan hibah 2019 yang ternyata tidak ada penggunaan bagi bonus atlet.^(vtr)